

DAMPAK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP STABILITAS EKONOMI DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Ibnurozi Khalid Darmawan¹, Saiful Bahri², Saddam Hosen³

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Madura^{1,2,3}

Email: ibnurozi77@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 12 Bulan : Desember Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Money laundering (ML) has become a critical issue in the global economy, including in Indonesia, as it can undermine economic stability and public trust in the financial system. In Indonesia, Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering is the primary legal framework to address this issue. However, despite clear regulations, the implementation and enforcement of laws related to ML face various challenges, such as the lack of coordination among supervisory agencies and imperfections in the suspicious transaction reporting system. This article evaluates the effectiveness of the law, compares it with international policies, and provides recommendations for strengthening Indonesia's legal and policy framework. The use of advanced technology, capacity building for supervisory agencies, and better coordination among relevant agencies are key to effectively combating ML.</i></p> <p>Keyword: Money Laundering (ML), Law No. 8 of 2010, Legal Policy, Law Enforcement</p>

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) telah menjadi isu krusial dalam perekonomian global, termasuk di Indonesia, karena dapat merusak stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Di Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi payung hukum utama untuk menangani masalah ini. Namun, meskipun sudah ada regulasi yang jelas, implementasi dan penegakan hukum terkait TPPU masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas dan ketidaksempurnaan dalam sistem pelaporan transaksi mencurigakan. Artikel ini mengevaluasi efektivitas undang-undang tersebut, membandingkannya dengan kebijakan internasional, dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem hukum dan kebijakan di Indonesia. Penggunaan teknologi canggih, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, serta koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait menjadi kunci untuk mengatasi TPPU secara efektif.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Kebijakan Hukum, Penegakan Hukum

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu kejahatan yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian baik pada tingkat global maupun lokal. TPPU merujuk pada proses menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal, seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan penggelapan pajak, dengan tujuan untuk membuatnya tampak sah dan dapat dipergunakan dalam transaksi ekonomi yang sah. Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi memudahkan individu atau kelompok untuk menyembunyikan transaksi keuangan mereka melalui berbagai saluran, seperti perbankan dan pasar keuangan internasional. Hal ini membuat TPPU semakin sulit untuk dideteksi dan ditanggulangi (Saptono, 2024).

Di Indonesia, masalah TPPU menjadi semakin serius. Negara ini telah menjadi salah satu negara yang mengalami peningkatan signifikan dalam kasus pencucian uang. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus TPPU yang cukup signifikan. Keberadaan tindak pidana ini tidak hanya merugikan negara secara finansial melalui penghindaran pajak dan pembiayaan ilegal, tetapi juga menciptakan kerentanan dalam sistem keuangan dan pemerintahan. Dalam tingkat global, pencucian uang juga mempengaruhi integritas sistem keuangan internasional yang dapat berdampak pada perdagangan dan investasi antarnegara. Oleh karena itu, perlu ada perhatian lebih besar terhadap dampak negatif dari TPPU ini.

Dampak TPPU terhadap perekonomian sangat luas. Secara langsung, pencucian uang dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi, mengganggu stabilitas pasar finansial, dan memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi. Proses ini berpotensi menyebabkan inflasi yang tidak terkendali, menciptakan ketidakstabilan nilai tukar, serta meningkatkan biaya transaksi dalam perekonomian. Secara tidak langsung, pencucian uang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan perbankan, yang merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap integritas sektor keuangan atau sistem perbankan negara, maka arus investasi asing yang sangat dibutuhkan oleh negara dapat terhambat, yang berujung pada gangguan stabilitas ekonomi (Samuji, 2024).

Penting untuk dicatat bahwa TPPU juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintahan. Ketika pelaku tindak pidana pencucian uang merasa bahwa sistem hukum tidak dapat menindak mereka secara tegas, maka ini akan mendorong terciptanya ketidakadilan dalam masyarakat dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Ketidakmampuan negara dalam menangani TPPU secara efektif juga menunjukkan kelemahan

dalam tata kelola negara dan hukum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kredibilitas Indonesia di mata internasional.

Kajian tentang TPPU menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks kebijakan ekonomi dan hukum di Indonesia. Salah satu kebijakan yang perlu diperkuat adalah penguatan sistem hukum yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan TPPU. Tanpa kebijakan hukum yang tegas, pencucian uang dapat berkembang dengan bebas dan semakin merugikan negara. Selain itu, kebijakan ekonomi yang tidak memperhitungkan dampak pencucian uang juga dapat mengabaikan ancaman terhadap perekonomian negara, yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan aman.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana TPPU dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk menangani dampak TPPU secara lebih efektif. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat mengurangi potensi kerugian yang timbul akibat TPPU dan memperkuat sistem keuangan serta ekonomi negara.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, pertama, apa saja dampak TPPU terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia? Kedua, bagaimana TPPU mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan perbankan? Ketiga, kebijakan hukum apa yang diperlukan untuk menangani TPPU secara efektif? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi dampak TPPU yang merugikan perekonomian negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh TPPU terhadap stabilitas perekonomian nasional dan global, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana TPPU mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keandalan dan integritas sistem keuangan, serta dampaknya terhadap perilaku ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Rekomendasi kebijakan yang lebih efektif diharapkan dapat diberikan untuk mengurangi atau bahkan mengeliminasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh TPPU di Indonesia.

Batasan masalah penelitian ini adalah bahwa fokus utama akan diberikan pada dampak TPPU dalam konteks Indonesia dan negara berkembang, mengingat kompleksitas sistem keuangan yang ada di negara-negara tersebut. Penelitian ini tidak akan membahas secara mendalam mengenai seluruh aspek hukum TPPU, melainkan akan lebih banyak difokuskan pada dampaknya terhadap perekonomian, termasuk stabilitas makroekonomi dan

kepercayaan publik terhadap sektor perbankan dan keuangan. Pembahasan juga akan menyoroti kebijakan ekonomi dan hukum yang ada di Indonesia serta bagaimana kebijakan tersebut dapat diperbaiki untuk memitigasi dampak dari TPPU.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena dampak tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Jenis penelitian ini lebih mengutamakan pemahaman mendalam tentang permasalahan yang diteliti melalui kajian kasus dan literatur terkait. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari berbagai sumber sekunder, termasuk laporan keuangan, data statistik ekonomi, laporan kasus hukum TPPU, serta publikasi dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan PBB. Pendekatan ini memungkinkan untuk menganalisis fenomena dengan cara yang lebih komprehensif dan relevan, memberikan wawasan tentang dampak yang timbul dari TPPU terhadap sektor ekonomi dan sistem keuangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi terkait dengan TPPU serta dampaknya terhadap perekonomian. Selain itu, wawancara dengan ahli ekonomi dan praktisi hukum juga dilakukan untuk mendapatkan pandangan profesional yang mendalam mengenai isu ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, yang akan membantu dalam pemetaan isu-isu utama terkait TPPU, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan publik. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih terperinci dan memberikan rekomendasi yang berguna untuk penanganan masalah ini secara efektif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak TPPU terhadap Stabilitas Ekonomi

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun global. Salah satu dampak utama yang ditimbulkan adalah penurunan kualitas investasi. Aktivitas pencucian uang seringkali mengarah pada aliran dana ilegal yang mengganggu transparansi pasar. Hal ini menyebabkan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi di negara tersebut. Ketika pasar uang dipenuhi oleh dana yang tidak jelas asal-usulnya, investor merasa khawatir akan adanya kerugian yang tidak terduga, sehingga berpotensi untuk menarik investasinya atau menahan investasi baru. Akibatnya, kualitas investasi di pasar modal dan

sektor-sektor penting lainnya dapat menurun. Selain itu, TPPU dapat meningkatkan risiko sistemik dalam sektor perbankan, karena adanya aliran dana yang tidak dapat dilacak dengan jelas, yang dapat merusak integritas dan kestabilan sistem keuangan (Afrillo, 2024).

Dampak selanjutnya dari TPPU terhadap stabilitas ekonomi adalah pengaruhnya terhadap indikator makroekonomi, seperti inflasi, suku bunga, dan arus modal asing. TPPU dapat menyebabkan distorsi dalam sistem harga karena adanya dana ilegal yang memengaruhi permintaan dan penawaran di pasar. Hal ini bisa menyebabkan inflasi yang tidak terkendali, terutama jika dana yang dicuci digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam jumlah besar, yang meningkatkan permintaan tanpa disertai dengan peningkatan produksi yang setara. Suku bunga juga dapat terpengaruh, karena adanya ketidakpastian ekonomi yang tinggi dapat memaksa bank sentral untuk menaikkan suku bunga guna menjaga kestabilan mata uang dan menarik modal asing. Selain itu, TPPU dapat mengurangi arus modal asing, karena investor asing cenderung menghindari pasar yang rawan terhadap kegiatan ilegal seperti pencucian uang. Ketika investor asing melihat adanya potensi risiko yang tinggi, mereka akan mengalihkan investasinya ke negara lain yang lebih stabil dan transparan.

Dalam konteks krisis ekonomi, TPPU memainkan peran yang tidak kalah penting. Salah satu contoh nyata adalah kasus krisis keuangan Asia pada tahun 1997, di mana aktivitas pencucian uang turut memperburuk situasi ekonomi di beberapa negara Asia. Negara-negara yang memiliki sistem keuangan yang lemah dan rentan terhadap praktik TPPU, seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand, mengalami penurunan tajam dalam nilai tukar mata uang mereka. TPPU memperburuk kondisi ini dengan memicu ketidakpastian yang lebih besar di pasar finansial. Dalam kasus ini, krisis ekonomi yang disebabkan oleh masalah struktural dalam sektor keuangan semakin diperparah dengan aliran dana ilegal yang sulit dilacak. Praktik-praktik seperti ini menyebabkan kerugian besar bagi negara-negara yang sudah berada dalam kondisi ekonomi yang rapuh, sehingga memperlambat pemulihan ekonomi (Putra, 2024).

TPPU juga mengarah pada peningkatan ketimpangan sosial-ekonomi, yang lebih jauh merusak stabilitas ekonomi. Ketika dana yang diperoleh secara ilegal dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan disembunyikan dalam sistem perbankan, hal ini mengurangi jumlah dana yang tersedia untuk pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Pembiayaan untuk proyek-proyek publik, pembangunan infrastruktur, dan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan menjadi terhambat karena alokasi dana yang tidak efisien. Ketimpangan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses ke dana ilegal dan mereka yang bergantung pada sumber daya ekonomi yang sah semakin lebar, yang dapat

mengarah pada ketidakstabilan sosial dan politik. Ketika sebagian besar kekayaan terakumulasi pada kelompok tertentu akibat pencucian uang, ketidakpercayaan terhadap sistem ekonomi dan pemerintah semakin meningkat.

Penting untuk mencatat bahwa TPPU tidak hanya berdampak pada perekonomian negara yang terlibat secara langsung, tetapi juga pada perekonomian global. Aktivitas pencucian uang menghubungkan pasar ilegal dan pasar keuangan global, yang menciptakan dampak negatif pada sistem perdagangan internasional dan hubungan ekonomi antarnegara. Negara-negara yang tidak memiliki kebijakan anti-pencucian uang yang kuat cenderung menjadi tempat berlindung bagi dana ilegal, yang merusak reputasi mereka dalam perdagangan global. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi daya saing negara di pasar internasional, serta merugikan hubungan ekonomi dan politik antara negara yang tergabung dalam komunitas internasional. Organisasi internasional seperti IMF dan World Bank menyadari hal ini, sehingga mereka mendorong negara-negara untuk memperkuat kebijakan anti-pencucian uang untuk melindungi sistem ekonomi global (Sugianto, 2025).

TPPU merupakan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun global. Dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor perbankan dan keuangan, tetapi juga merambat ke sektor-sektor lain yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kepercayaan publik. Untuk itu, penting bagi negara untuk mengambil langkah-langkah yang tegas dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, guna menjaga agar perekonomian tetap stabil dan sehat. Penerapan kebijakan yang ketat terhadap pencucian uang dapat meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan, sehingga menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi investasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengaruh TPPU terhadap Sektor Keuangan

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap sektor keuangan, terutama dalam hal merusak reputasi dan integritas institusi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Praktik pencucian uang yang terjadi di dalam sektor perbankan atau lembaga keuangan lainnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan itu sendiri. Ketika dana yang terlibat dalam aktivitas ilegal dapat disembunyikan dan dipindahkan tanpa pengawasan yang memadai, hal ini menciptakan ketidakpastian mengenai transparansi transaksi. Ketidakjelasan asal-usul dana yang beredar di pasar keuangan menyebabkan investor dan masyarakat ragu untuk melakukan transaksi di sektor perbankan, sehingga menurunkan volume investasi dan transaksi finansial. Reputasi lembaga keuangan yang terlibat dalam pencucian uang bisa tercemar, dan jika hal ini terungkap

ke publik, kepercayaan terhadap sektor perbankan secara keseluruhan bisa berkurang secara signifikan (Nouval, 2024).

Pencucian uang juga merusak kredibilitas dan citra institusi perbankan yang diharapkan berfungsi sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan. Seiring berjalannya waktu, apabila bank atau lembaga keuangan menjadi sarana untuk aktivitas pencucian uang, dampak reputasi ini dapat meluas, dan perbankan menjadi lebih rentan terhadap krisis likuiditas dan krisis kepercayaan. Beberapa contoh yang mencuat di dunia internasional, seperti kasus Bank of Credit and Commerce International (BCCI) dan kasus besar lainnya yang melibatkan bank-bank besar, menunjukkan bagaimana kerusakan reputasi ini dapat mengarah pada keruntuhan lembaga keuangan. Dalam konteks Indonesia, kasus TPPU yang melibatkan perbankan akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan negara, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan (Rosidah, 2025).

Setelah krisis keuangan yang dipicu oleh TPPU, pemulihan sektor keuangan sering kali memerlukan waktu yang cukup lama. Ketika publik kehilangan kepercayaan pada institusi keuangan, mereka cenderung menarik dana mereka dan memilih untuk menyimpan uang di tempat yang dianggap lebih aman. Hal ini bisa mengarah pada penurunan jumlah dana yang beredar di pasar dan pengurangan kredit yang tersedia untuk pembiayaan usaha dan konsumen. Dalam banyak kasus, pemulihan sektor perbankan pasca-krisis memerlukan perbaikan kebijakan yang serius dan peran aktif pemerintah dalam menjamin transparansi dan integritas sistem perbankan. Misalnya, reformasi kebijakan yang mengatur pengawasan dan pengendalian terhadap aliran dana di sektor perbankan menjadi salah satu langkah penting yang harus diambil untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Selain itu, lembaga-lembaga keuangan harus melakukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki prosedur dan kebijakan internal guna mencegah praktik-praktik pencucian uang.

Proses pemulihan juga memerlukan kerja sama antara lembaga keuangan, regulator, dan pemerintah dalam menangani kasus TPPU. Keberhasilan pemulihan dapat dilihat dari sejauh mana lembaga-lembaga keuangan mampu memperbaiki reputasi mereka, menerapkan kebijakan pengendalian internal yang lebih ketat, serta mematuhi peraturan internasional terkait pencegahan pencucian uang. Negara-negara yang berhasil dalam mengatasi dampak TPPU sering kali melakukannya dengan cara meningkatkan kualitas pengawasan dan menerapkan sanksi yang tegas bagi lembaga keuangan yang terlibat dalam praktik ilegal. Oleh karena itu, pemulihan sektor keuangan pasca-krisis akibat TPPU membutuhkan perhatian

husus terhadap aspek regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aliran dana dalam sistem perbankan (Anwar, 2024).

Namun, tantangan besar dalam upaya pencegahan TPPU terletak pada implementasi kebijakan anti-pencucian uang (APU) yang efektif. Meskipun banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi kebijakan APU yang sesuai dengan standar internasional, seperti rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF), tantangan utama adalah dalam implementasi dan pengawasan yang konsisten. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum dan pengawasan transaksi keuangan, baik itu bank sentral, otoritas pengawas pasar modal, atau lembaga anti pencucian uang. Tanpa adanya koordinasi yang kuat, pengawasan terhadap transaksi keuangan menjadi kurang efektif, sehingga celah-celah untuk melakukan pencucian uang tetap terbuka.

Kompleksitas dan perkembangan teknologi finansial (fintech) turut menambah tantangan dalam penerapan kebijakan APU. Layanan perbankan digital, transaksi cryptocurrency, dan teknologi baru lainnya sering kali menyulitkan lembaga pengawasan untuk memantau aliran dana secara real-time. Banyak transaksi yang dilakukan secara anonim atau melalui platform yang sulit untuk dilacak, yang meningkatkan risiko pencucian uang dalam sektor fintech. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang lebih dinamis dalam kebijakan APU dengan memperhatikan kemajuan teknologi dan adaptasi pasar finansial. Kebijakan ini juga harus mencakup pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk lembaga pengawas dan institusi keuangan, agar mereka dapat menangani ancaman TPPU yang semakin kompleks (Pesman, 2025).

Meskipun tantangan dalam implementasi kebijakan APU sangat besar, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengurangi dampaknya. Misalnya, memperkuat mekanisme pelaporan dan verifikasi transaksi yang mencurigakan, memperketat persyaratan identifikasi nasabah (KYC), dan meningkatkan kerja sama internasional dalam berbagi informasi terkait aliran dana ilegal. Dengan kebijakan yang lebih terintegrasi dan penegakan hukum yang lebih tegas, sektor keuangan dapat mengurangi potensi risiko pencucian uang dan memulihkan kepercayaan publik yang hilang akibat praktik tersebut. Dalam jangka panjang, langkah-langkah ini akan membantu memperbaiki reputasi sektor keuangan dan menciptakan iklim investasi yang lebih aman dan transparan (Afrillo, 2025).

Pengaruh TPPU terhadap sektor keuangan sangat besar dan kompleks. Kerusakan reputasi sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya, pemulihan pasca-krisis, serta tantangan dalam implementasi kebijakan APU, memerlukan perhatian serius dari semua pihak

yang terlibat, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Dengan penerapan kebijakan yang lebih ketat dan peningkatan pengawasan, diharapkan sektor keuangan dapat lebih terlindungi dari ancaman pencucian uang dan kembali memperoleh kepercayaan publik.

Persepsi dan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Keuangan

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) memiliki dampak yang besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, khususnya perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Kepercayaan publik adalah elemen penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, karena sektor ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam bentuk simpanan dan transaksi finansial. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem keuangan mudah dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang, maka mereka cenderung kehilangan kepercayaan terhadap integritas sistem tersebut. Pencucian uang yang melibatkan lembaga keuangan dapat menciptakan persepsi bahwa sektor perbankan tidak cukup transparan atau tidak mampu mengendalikan aktivitas ilegal yang terjadi di dalamnya. Akibatnya, masyarakat mungkin memilih untuk menarik simpanan mereka, menghindari transaksi finansial, atau beralih ke instrumen keuangan yang dianggap lebih aman dan terpercaya (Afrillo, 2025).

Pengaruh TPPU terhadap kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat mengarah pada dampak jangka panjang yang merugikan. Ketika publik kehilangan kepercayaan terhadap sektor perbankan, mereka mungkin akan menghindari penggunaan bank dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, memilih untuk menyimpan uang mereka di luar sistem perbankan formal, atau beralih ke sektor informal yang lebih sulit dikontrol. Hal ini dapat memperburuk masalah likuiditas di bank dan merusak stabilitas keuangan negara. Kepercayaan publik terhadap sektor perbankan sangat terkait dengan persepsi mengenai seberapa besar kemauan dan kemampuan lembaga keuangan untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang. Oleh karena itu, penting bagi bank dan lembaga keuangan untuk menjaga reputasi mereka melalui kebijakan yang jelas dan tegas dalam memerangi pencucian uang dan memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi di dalam sistem mereka adalah sah.

Studi kasus yang menunjukkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan akibat skandal TPPU dapat dilihat dalam beberapa contoh di dunia internasional. Salah satunya adalah skandal pencucian uang yang melibatkan bank terbesar di dunia, yaitu Bank of Credit and Commerce International (BCCI). Kasus ini mengungkapkan bagaimana praktik pencucian uang yang melibatkan bank besar dapat merusak reputasi sektor perbankan

secara keseluruhan. Ketika publik mengetahui bahwa bank-bank besar digunakan sebagai tempat untuk menyembunyikan dana hasil kejahatan, mereka kehilangan kepercayaan terhadap integritas sistem keuangan. Akibatnya, banyak nasabah yang menarik simpanan mereka dan mengalihkan dana mereka ke sektor yang lebih aman, yang pada gilirannya menyebabkan krisis likuiditas dan penurunan tajam dalam volume transaksi di sektor perbankan (Abdullah, 2025).

Di Indonesia, kasus serupa terjadi ketika beberapa bank lokal terlibat dalam praktik pencucian uang yang mengarah pada skandal besar. Masyarakat mulai meragukan kemampuan bank-bank tersebut dalam menjaga keandalan sistem keuangan dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap transaksi yang berlangsung. Skandal semacam ini bukan hanya merusak reputasi bank yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi sistem perbankan secara keseluruhan. Seiring dengan berkurangnya kepercayaan masyarakat, sektor perbankan mengalami kesulitan untuk menarik investor dan nasabah baru. Dampak lebih jauh dari hilangnya kepercayaan ini adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi, karena sektor perbankan memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan bagi sektor usaha dan investasi.

Sebagai bagian dari penelitian ini, dilakukan survei untuk menggali persepsi publik terkait pencucian uang dan dampaknya terhadap kepercayaan terhadap perbankan. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa khawatir dengan tingginya tingkat pencucian uang di Indonesia dan percaya bahwa hal tersebut memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas sistem perbankan. Sebagian besar responden juga menyatakan bahwa mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi finansial jika mereka merasa tidak yakin dengan transparansi dan keamanan sistem keuangan. Banyak dari responden yang mengungkapkan ketidakpercayaan mereka terhadap kemampuan bank dalam menangani transaksi mencurigakan, terutama jika mereka mengetahui adanya keterlibatan bank dalam kasus pencucian uang (Mufidah, 2025).

Wawancara dengan ahli ekonomi dan praktisi hukum memberikan wawasan tambahan mengenai persepsi publik terhadap sistem keuangan dan pencucian uang. Beberapa ahli menilai bahwa kepercayaan publik dapat dipulihkan dengan cara meningkatkan transparansi dalam transaksi perbankan dan memperketat kebijakan anti-pencucian uang. Namun, mereka juga mencatat bahwa ini memerlukan waktu dan upaya yang tidak sedikit, terutama jika tidak ada koordinasi yang kuat antara pihak perbankan, lembaga pengawas, dan pemerintah. Kebijakan yang lebih ketat dalam hal identifikasi nasabah (KYC), pemantauan transaksi yang mencurigakan, dan sanksi tegas bagi lembaga keuangan yang terlibat dalam pencucian uang

adalah langkah-langkah yang dapat membantu memperbaiki citra sektor perbankan di mata publik.

Meskipun demikian, tantangan utama dalam memulihkan kepercayaan publik adalah ketidakpastian mengenai efektivitas kebijakan yang ada. Banyak masyarakat merasa bahwa meskipun ada regulasi yang ketat, praktik pencucian uang tetap berlangsung di balik layar dan sulit untuk terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan implementasi pengawasan harus lebih adaptif dan transparan agar dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa sistem keuangan benar-benar aman dan terjaga dari praktik-praktik ilegal yang dapat merusak stabilitas ekonomi (Andiono, 2025).

Pengaruh TPPU terhadap persepsi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan sangat besar. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dapat memperburuk stabilitas keuangan, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan merusak citra institusi perbankan secara luas. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga keuangan untuk terus meningkatkan transparansi, menerapkan kebijakan yang lebih tegas dalam pencegahan pencucian uang, dan memastikan bahwa sistem perbankan dapat dipercaya oleh masyarakat. Upaya-upaya tersebut akan sangat membantu dalam memulihkan kepercayaan publik yang hilang dan menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan aman.

Pengaruh TPPU terhadap Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) memiliki dampak yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang. Salah satu dampak utama adalah TPPU berfungsi sebagai hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika dana yang diperoleh secara ilegal dimasukkan ke dalam perekonomian, hal ini mengarah pada alokasi sumber daya yang tidak efisien dan tidak produktif. Sumber daya ekonomi yang dialokasikan untuk kegiatan ilegal, seperti pencucian uang, seharusnya bisa digunakan untuk investasi produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Alih-alih digunakan untuk mendanai sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan, dana yang tercemar oleh TPPU justru mengarah pada aktivitas ekonomi yang merusak dan tidak berkelanjutan. Ini menghambat pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata, karena investasi yang dihasilkan dari kegiatan ilegal tidak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang (Saptono, 2024).

TPPU dapat menyebabkan penurunan efisiensi dalam perekonomian. Ketika dana ilegal mengalir melalui sistem keuangan, sektor-sektor yang seharusnya mendapat pembiayaan yang sah menjadi terhambat. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor

formal, yang membutuhkan modal untuk berkembang, dapat kesulitan mengakses pembiayaan jika dana yang beredar di pasar lebih banyak digunakan untuk kegiatan ilegal. Pada gilirannya, hal ini dapat memperburuk ketimpangan dalam distribusi modal dan mempengaruhi daya saing ekonomi negara secara keseluruhan. Tanpa adanya alokasi yang tepat terhadap sumber daya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang akan terkendala, dan perekonomian akan lebih rentan terhadap krisis finansial (Samuji, 2024).

Di sisi lain, pengaruh TPPU terhadap kepercayaan publik juga sangat berhubungan erat dengan daya tarik investasi langsung asing (FDI). Kepercayaan publik adalah salah satu faktor kunci dalam menarik investor asing untuk menanamkan modalnya. Ketika TPPU marak terjadi di suatu negara, hal ini akan menurunkan persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi dan keandalan sistem keuangan negara tersebut. Investor asing cenderung menghindari negara-negara yang dianggap memiliki tingkat pencucian uang yang tinggi karena mereka merasa tidak aman menanamkan modal di negara tersebut. Praktik TPPU yang terjadi dalam sektor perbankan dan keuangan meningkatkan ketidakpastian pasar, yang membuat investor asing berpikir dua kali untuk berinvestasi. Mereka khawatir akan adanya risiko kehilangan investasi mereka jika sistem keuangan tidak transparan dan rentan terhadap aktivitas ilegal.

Seiring dengan itu, TPPU yang mengganggu stabilitas sistem perbankan dan pasar finansial juga memengaruhi posisi negara dalam perdagangan global. Negara dengan sistem keuangan yang tidak aman akan cenderung mengurangi aliran investasi langsung asing, karena investor akan lebih memilih pasar yang lebih stabil dan transparan. Jika kepercayaan investor terhadap sistem keuangan suatu negara berkurang, maka peluang untuk mendapatkan investasi asing yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi akan terbatas. Sebaliknya, negara-negara dengan kebijakan yang lebih tegas terhadap TPPU dan sistem keuangan yang transparan akan menarik lebih banyak FDI, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang (Afrillo, 2024).

Selain pengaruh terhadap FDI, TPPU juga berkontribusi terhadap ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi dalam suatu negara. Pencucian uang, pada dasarnya, menciptakan ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya. Ketika dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif disalurkan ke dalam sektor ilegal, maka distribusi sumber daya dalam perekonomian menjadi tidak merata. Hasilnya, sektor-sektor yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi, seperti industri, perdagangan, dan infrastruktur, malah kekurangan modal yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, dana yang digunakan untuk pencucian uang sering kali mengarah pada sektor-sektor yang tidak memiliki dampak positif

langsung terhadap pembangunan, seperti sektor properti mewah atau barang-barang mewah yang tidak berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesenjangan sosial-ekonomi ini bisa diperburuk oleh praktik TPPU. Ketika sejumlah besar kekayaan diambil oleh kelompok tertentu yang terlibat dalam pencucian uang, dan masyarakat yang lebih luas tetap bergantung pada sumber daya terbatas yang dialokasikan secara tidak efisien, hal ini memperburuk ketimpangan ekonomi. Pencucian uang memperburuk kondisi tersebut dengan menciptakan kesenjangan antara mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal dan mereka yang bergantung pada pekerjaan sah untuk penghidupan mereka. Ketidakmerataan dalam distribusi kekayaan ini tidak hanya merugikan perekonomian dalam jangka pendek tetapi juga memperlambat kemajuan sosial dalam jangka panjang, karena ketimpangan ini bisa menciptakan ketegangan sosial yang merusak iklim investasi dan stabilitas politik (Putra, 2024).

Dampak TPPU terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang juga dapat memperburuk pengangguran dan kemiskinan. Dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal yang dicuci tidak mengalir ke sektor-sektor yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Sebaliknya, sektor yang mengalirkan dana ke dalam pencucian uang seringkali tidak menciptakan nilai tambah yang berarti bagi perekonomian. Ketika sektor-sektor ini menguasai sebagian besar aliran dana, sektor-sektor lain yang lebih produktif dan menciptakan lapangan kerja, seperti sektor manufaktur dan teknologi, menjadi kurang berkembang. Hal ini menyebabkan stagnasi dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan memperburuk tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat yang tidak terlibat dalam sektor ekonomi informal.

Kebijakan Hukum dan Penegakan TPPU di Indonesia

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan yang serius dan merusak sistem perekonomian, yang memerlukan pengaturan hukum yang kuat dan sistem penegakan yang efektif. Di Indonesia, upaya untuk mencegah dan memberantas TPPU diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang bersih dan transparan, serta mencegah aliran dana yang berasal dari kegiatan ilegal yang dapat merusak ekonomi negara. Meskipun sudah ada payung hukum yang jelas, tantangan utama terletak pada efektivitas implementasi dan pengawasan terhadap praktik pencucian uang di sektor keuangan. Evaluasi terhadap undang-undang ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih ada sejumlah kekurangan, seperti kurangnya kapasitas lembaga pengawas,

ketidaktepatan dalam sistem pelaporan, serta implementasi yang tidak konsisten di tingkat praktik.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 adalah kurangnya koordinasi antara lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) memiliki peran utama dalam pemantauan transaksi mencurigakan, masih banyak kasus pencucian uang yang lolos dari pengawasan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan dan kesadaran dari sektor-sektor lain seperti perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan pihak berwenang lainnya dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, efektivitas undang-undang ini perlu diperkuat dengan melibatkan lebih banyak pihak dan meningkatkan kapasitas pengawasan serta penegakan hukum secara lebih terintegrasi (Sugianto, 2025).

Dari perspektif kebijakan internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF), yang merupakan badan antarnegara yang mengembangkan standar global untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam konteks ini, perbandingan antara kebijakan Indonesia dan kebijakan internasional menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah membuat kemajuan signifikan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. FATF menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam sistem keuangan dan penguatan mekanisme pelaporan yang lebih terperinci. Selain itu, FATF juga mengingatkan tentang perlunya kebijakan yang lebih ketat untuk sektor-sektor yang rentan terhadap pencucian uang, seperti sektor properti dan perjudian online. Indonesia perlu memperkuat aturan dan kebijakan agar sesuai dengan standar internasional yang terus berkembang (Nouval, 2024).

Di sisi lain, banyak negara telah memperkenalkan kebijakan yang lebih terstruktur dalam pemberantasan TPPU. Misalnya, negara-negara anggota Uni Eropa memiliki sistem pelaporan transaksi mencurigakan yang lebih efisien dan pelaksanaan sanksi yang lebih tegas bagi lembaga keuangan yang gagal memenuhi kewajiban anti-pencucian uang (APU). Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura juga menunjukkan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan yang mengintegrasikan teknologi untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dengan lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi kebijakan yang lebih inovatif dan berbasis teknologi untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap TPPU (Rosidah, 2025).

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dalam hal TPPU, Indonesia perlu memperkuat kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Salah satu rekomendasi penting adalah memperbaiki koordinasi dengan lembaga-lembaga internasional seperti Interpol dan FATF dalam pertukaran informasi terkait transaksi mencurigakan dan pelaku pencucian uang. Selain itu, kerjasama bilateral dengan negara-negara lain yang menjadi tujuan utama aliran dana ilegal juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil di Indonesia juga mendapat dukungan dari negara lain. Hal ini akan mempercepat deteksi dan penghentian aliran dana ilegal yang dapat merusak stabilitas ekonomi global.

Rekomendasi lain untuk memperkuat sistem hukum terkait TPPU adalah meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemberantasan pencucian uang, seperti PPATK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah dengan memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada petugas yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Selain itu, perlu ada peningkatan penggunaan teknologi canggih, seperti sistem analisis data besar (big data) dan kecerdasan buatan (AI), untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan secara lebih efisien. Dengan demikian, sistem pengawasan yang lebih modern dan terintegrasi akan membantu memerangi praktik pencucian uang dengan lebih efektif (Anwar, 2024).

Perlu ada perbaikan dalam hal sanksi yang diberikan kepada pihak yang terlibat dalam TPPU. Meskipun Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 sudah mencakup sanksi pidana yang berat, pengawasan yang lebih ketat dan penerapan sanksi yang konsisten akan memberikan efek jera bagi pelaku TPPU. Negara perlu memastikan bahwa tidak ada ruang bagi individu atau kelompok untuk melanggar hukum tanpa mendapatkan hukuman yang setimpal. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan memberikan sinyal yang jelas bahwa Indonesia serius dalam memberantas pencucian uang dan bahwa sistem keuangan Indonesia aman dan dapat dipercaya.

D. KESIMPULAN

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan masalah besar yang dapat merusak stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, efektivitas implementasi dan penegakan hukum masih perlu diperbaiki. Terlepas dari adanya kebijakan yang jelas, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas, serta ketidaksempurnaan dalam pelaporan dan pengawasan transaksi

yang mencurigakan. Perbandingan dengan kebijakan internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu memperkuat aturan dan meningkatkan kapasitas lembaga yang terlibat dalam pemberantasan TPPU untuk mencapai hasil yang lebih maksimal.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan TPPU di Indonesia, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, perlu diperkuat kerjasama antara lembaga pengawas, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan pertukaran informasi yang cepat dan akurat terkait aliran dana ilegal. Kedua, Indonesia harus meningkatkan penggunaan teknologi canggih, seperti big data dan kecerdasan buatan, untuk mempermudah deteksi transaksi mencurigakan. Ketiga, penguatan kapasitas lembaga yang terlibat dalam pencegahan pencucian uang, melalui pelatihan intensif dan peningkatan infrastruktur, harus menjadi prioritas. Terakhir, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten akan memberikan efek jera bagi para pelaku TPPU, serta menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan dapat dipercaya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Saptono, S., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Sebagai Upaya Pencegahannya Di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 622-633. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8899>
- Samuji, S. (2024). Aspek Hukum Pencucian Uang Dalam Bentuk Investasi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 8746-8757. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.7610>
- Henry Afrillo. Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. (2024). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882* , 2(1), 425-430. <https://doi.org/10.62379/ebqpj687>
- Dwi Putra, R., Stevany Putri Sinlae, E., Suhaila Syafa, T., Fatika Syahda, I., & Siswajanthi, F. (2024). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 70-80. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.205>
- sugianto, F., Herawati, E. ., Mustopa, H. ., Sander, M. ., & Fujianti, P. J. . (2025). Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa di Bidang Ekonomi . *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(7), 2819-2831. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i7.32225>
- Nouval, M. D., & Prasetyo, B. (2024). Pengalihan Pertanggungjawaban dalam Kasus Tindak

- Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7). Diambil dari <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/694>
- Rosidah, A., Ghassani, A., Arsita, D., Nisaa, M. K., & Artamevia, N. (2025). Dampak Sistemik Tindak Pidana Kecurangan Terhadap Kepercayaan Publik di Sektor Pemerintahan. *Lentera Ilmu*, 1(1), 167–176. <https://doi.org/10.59971/li.v1i1.135>
- Anwar, Asrul (2024) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/37971/>
- Pesman Laia. Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang: Telaah Atas Putusan Nomor 351/PID.SUS/2022/PN JKT.PST. (2025). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN : 3031-8882, 2(2), 805-809. <https://doi.org/10.62379/335k8h24>
- Henry Afrillo. Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 476/PID.SUS/2023 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. (2025). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN : 3031-8882, 2(2), 810-814. <https://doi.org/10.62379/ktdwpx16>
- Henry Afrillo. Analisis Peran Hukum Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Melalui Evaluasi Regulasi Dan Praktik. (2025). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN : 3031-8882, 2(2), 799-804. <https://doi.org/10.62379/pwz1x297>
- Abdullah, Z., Nainggolan, M., & Ismed, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. *CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(2), 299-311. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i2.969>
- Nur Ayny Mufidah, & Romi Faslah. (2025). Pencucian Uang di Indonesia: Analisis dan Perspektif Islam. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(3), 267–271. Retrieved from <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/462>
- ANDIONO, ARIF (2025) PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS PENCUCIAN UANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/39881/>